

# ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EMPAT PILAR PENGEMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Arifin Tahir  
Dosen Universitas Negeri Gorontalo

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Empat Pilar Pengembangan Universitas Negeri Gorontalo.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang diperkuat dengan data kuantitatif (kuesioner). Data-data yang diperoleh berasal dari wawancara, observasi, Focus Group Discussion, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan triangulasi sumber. Aktivitas analisis data: data reduction, data display, dan conclusions drawing/verification.

Hasil penelitian implementasi kebijakan empat pilar pengembangan UNG, menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1) Bahwa implementasi kebijakan pilar Quality Assurance Policy, telah berjalan baik hal ini disebabkan kultur akademik sebagai enter ponit dari Quality Assurance Policy telah dirasakan oleh warga kampus UNG, dengan dukungan Informatika and Teknologi Policy dan Soft Skill policy serta Environment policy dengan entry point Program Tertib Parkir telah berjalan cukup baik. 2) Faktor pendukung implementasi kebijakan empat pilar pengembangan UNG adalah Komunikasi dan SDM sementara Partisipasi/Dukungan Publik Kampus masih perlu mendapat perhatian khusus. Partisipasi/Dukungan Publik Kampus masih masi bervariasi, dan pada umumnya dukungan terhadap kebijakan empat pilar pengembangan kampus hanya berada pada tataran pejabat di lingkungan UNG. Adapun hal-hal yang disarankan adalah : diperlukan konsistensidan komitmen dalam hal pelaksanaan empat pilar kebijakan pengembangan UNG oleh seluruh stakeholder di lingkungan kampus UNG. Dan Untuk membangun partisipasi/dukungan publik kampus, maka perlu ditata kembali sistem manajemen terbalik yang merupakan pola kerja dalam sistem kepemimpinan Rektor UNG agar tidak terjadi gesekan-gesekan kepentingan pada tataran manajerial di tingkat bawah.

**Kaata kunci:** Implementasi Kebijakan, Empat Pilar Kebijakan

## I. PENDAHULUAN

Kebijakan tidak sekedar suatu aturan tetapi lebih dari itu kebijakan perlu dipahami secara utuh dan benar sehingga apa yang diharapkan dari *ending* suatu kebijakan dapat tercapai. Ketika suatu *issue* yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi *issue* tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Dan ketika kebijakan tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi UU, Peraturan, atau keputusan, maka kebijakan tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Itulah sebabnya, Anderson (1984:113) berpendapat bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Seorang pelaku kebijakan pada intinya berharap agar ketika kebijakan tersebut diimplementasikan akan berjalan sesuai dan harapan dan cita-citanya. Tetapi dalam realiatnya implementasi kebijakan sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Saefullah dalam prakatanya pada buku Tachjan (2006:ix) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni perspektif politik dan

perspektif administrasi. Dimana perspektif politik dalam proses kebijakan senantiasa bernuansa kepentingan sementara dalam perspektif administrasi kebijakan publik merupakan ikhwil berkaitan dengan system, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat public (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas. Ini berarti bahwa pelaku kebijakan membutuhkan kehati-hatian dalam merumuskan suatu kebijakan agar diterima oleh semua stakeholder.

Rektor UNG sebagai pelaku kebijakan di lingkungan kampus UNG dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan merumuskan kebijakan yang dikenal dengan empat pilar kebijakan pengembangan Universitas Negeri Gorontalo, yakni *Quality Assurance*, *Soft Skill*, *IT* dan *Environment*.

Komitmen kuat Rektor sebagai pelaku kebijakan diwujudkan dengan menempatkan ke empat pilar sebagai skala prioritas pembangunan dalam *Grand Design* (Visi dan Misi Rektor) UNG 2010-2014, dengan harapan adanya perubahan yang mendasar dalam kampus merah maron tersebut. *Grand Design* dimaksud tergambar dalam misi UNG (Renstra UNG, 2010:12)

Berdasarkan hasil pengamatan yang didukung oleh berbagai informasi, seluruh sektor kehidupan kampus yang diharapkan dapat tersentuh oleh seluruh aparat kampus melalui empat pilar kebijakan realitasnya belum terasa maksimal. Beberapa pilar kebijakan berjalan lambat antara